

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDY KASUS PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MASYARAKAT MELALUI PEREKONOMIAN
KREATIF DI DESA DULOLONG KECAMATAN ABAL KABUPATEN
ALOR 2018)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Srata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

IRWAN RASANG
216130047

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TAHUN 2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

(Studi Kasus Pembangunan Sumberdaya Masyarakat Melalui Perekonomian
Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor Tahun 2018)



**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 16 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I

Drs. Mintasrihardi, M.H.
NIDN. 0830016101

Dosen Pembimbing II

Yudhi Lestana, S.IP., M.IP.
NIDN. 0827118801

Mengatahui,

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi Kasus Pembangunan Sumberdaya Masyarakat Melalui Perekonomian
Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor Tahun 2018)



Disusun dan diajukan Oleh

IRWAN RASANG
NIM. 216130047

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 19 Agustus 2020 dan
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

- | | | |
|--|------|--------------------------------|
| 1. <u>Drs. Mintasrihardi, M.H</u>
NIDN. 0830016101 | (PU) | (<i>[Signature]</i>
.....) |
| 2. <u>Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP</u>
NIDN. 0827118801 | (PP) | (<i>[Signature]</i>
.....) |
| 3. <u>Amin Saleh, S.Sos., MI.Kom</u>
NIDN. 0831128310 | (PN) | (<i>[Signature]</i>
.....) |

Mengatahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Irwan Rasang

Nim : 216130047

Alamat : Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor NTT.

Memang benar skripsi yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Kasus Pembanguna Sumberdaya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun 2018)*" asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi dimanapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang dipublikasi, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2020


IRWAN RASANG
216130047



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN RASANG
 NIM : 216130047
 Tempat/Tgl Lahir : DULONGA, 23.10.1997
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 082 390 828 654
 Judul Penelitian :-

Pembudayaan masyarakat dalam pembangunan budaya usaha
 milik desa (BUMDes) (studi kasus pembangunan sumber daya
 masyarakat melalui perikanan kreatif di desa dulonga
 Kecamatan ABAL Kabupaten Alor Tahun 2018)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *UR*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 20 Agustus 2020

Penulis



IRWAN RASANG
 NIM. 216130047

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN PASANG
 NIM : 216130047
 Tempat/Tgl Lahir : DULOLONG 23-10-1997
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 082 390 828 654
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pemberdayaan masyarakat melalui ~~pendidikan~~ *da'wah* Pengembangan *bank* *keuangan* *milik* *desa* (*BUMDES*) *Studi* *kasus* *Pembangunan* *sumber* *daya* *masyarakat* *ulawi* *Perencanaan* *kearifan* *di* *desa* *Dulolong* *Kacamatan* *Abul* *Kabupaten* *Alor* *Talun* *2018*

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 20 Agustus 2020

Penulis

IRWAN PASANG
 NIM. 216130047

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Irwan Rasang

Nim : 216130047

Alamat : Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor NTT.

Memang benar skripsi yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Kasus Pembanguna Sumberdaya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun 2018)*" asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi dimanapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang dipublikasi, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2020

IRWAN RASANG
216130047

MOTTO

**“ BERMIMPILAH SETINGGI LANGGIT, AGAR JIKA
ENKKAU JATU MAKA ENKKAU AKAN JATUH
DIANTARA BINTANG- BINTANG”**

Ir. Soekarno

**“ JANGAN PERNAH PUAS UNTUK MENAKLUKAN GELOMBANG
TETAPI BERSIAPLAH UNTUK MENGHADAPI SAMUDRA “**

By, Irwan



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta Bakrim Rasang dan Suria Syukur (al-marhumah) terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada ayah dan ibu yang tidak pernah mengenal lelah melawan derasnya gelombang kehidupan demi sibuah hati yang kini telah menggapai cicitita yang diinginkan selama ini, dan juga tidak terlepas dari doa serta bimbingan dan dukungan sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ayah yang tak pernah kenal siang ataupun malam demi kesuksesan anakmu. Semua itu hanya mampu ananda berikan sebuah hadiah beruparasa bangga terhadap apa yang telah diperjuangkan selama ini.
2. Kawan-kawan Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TSP Mataram) yang selalu memberikan dukungan dan semangat
3. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2016, ucapan terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang yang pernah diberikan selama saya berada di kota seribu masjid khususnya di Universitas Muhammadiyah Mataram .
4. Dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Sahabat-sahabat dari Forum Komunikasi Mahasiswa Alor (FKMA, NTT Mataram) ungkapan terimakasih atas doa dan dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa karena atas berkat dan rahmat Nya-Lah penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Sarjana Srata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram Skripsi ini mengambil berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Kasus Pembanguna Sumberdaya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun 2018)”*

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah mendapatkan begitu banyak bantuan baik berupa materi, fisik maupun spiritual sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Drs. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi , S.Ip., M.Ip selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Drs.Mintasrihardi. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Skripsi.

5. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi .
7. Terimakasih kepada kekasiku yang telah menemaniku mulai dari Bimbingan Proposal sampai Bimbingan Skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penuli mengharapkan saran, kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dijadikan refrensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Mataram, 12 Agustus 2020
Penulis,

Irwan Rasang

**COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE DEVELOPMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES)**
(Case Study of Community Resources Development through Creative Economy
in Dulolong Village, Abal District, Alor District 2018)

Irwan Rasang, Drs. Mintasrihardi, M.H, Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
Students, first consultant, Second Consultant

ABSTRACT

BUMDes was created to improve the welfare of local village communities, economic conditions, and Village Original Income (PAD), processing village potential, and (human and natural resources) according to the needs of the village community. This study aimed to determine community empowerment in the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes). This research was a qualitative descriptive study. Data collection methods are observation, interviews, documentation. The results of this study indicated that the businesses managed by BUMDes Dulolong are woven fabrics, hair cakes, and bamboo furniture crafts (chairs and tables). The BUMDes of Dulolong Village that empowers the community was PAMDes. The role and contribution of BUMDES Dulolong had been felt in the welfare of the community by the presence of business units, but they had not been maximized. The problems faced by BUMDes in operating are varied. This is due to several factors, such as BUMDes Dulolong that do not have regulations or AD/ART, and the community does not understand about BUMDes, the existence of various social diseases, and the presence of double BUMDes management professions. So, the role and contribution of BUMDes was very important in advancing the village, especially in Dulolong village, Northwest Alor, Alor Regency.

Keywords: Empowerment, Village-Owned Enterprises, Economic

MENGESANKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI AGLINYA
MATARAM
KEPALA
LPT PDB
UNIVERSITAS MATARAM
NIDN. 0603048601

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDI KASUS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MASYARAKAT MELALUI PEREKONOMIAN KREATIF DI DESA DULOLONG KECAMATAN ABAL KABUPATEN ALOR 2018)

**Irwan Rasang, Drs. Mintasrihardi, M.H, Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
Mahasiswa, Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping**

ABSTRAK

BUMDes dibuat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal desa, kondisi perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PAD), pengolahan potensi desa, dan (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dikelola BUMDes Dulolong adalah kain tenun, kue rambut dan kerajinan mebel bambu (kursi dan meja). BUMDes Desa Dulolong yang memberdayakan masyarakat adalah PAMDes. Peran dan kontribusi BUMDES Dulolong dalam mensejahterakan masyarakat telah dirasakan dengan adanya unit-unit usaha, namun belum maksimal. Permasalahan yang dihadapi BUMDes dalam beroperasional begitu ragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti BUMDes Dulolong belum memiliki aturan atau AD/ART, masyarakat kurang memiliki pemahaman tentang BUMDes, adanya ragam penyakit sosial masyarakat, dan adanya dobel profesi pengelola BUMDes. Jadi, sangat penting peran dan kontribusi BUMDes dalam memajukan desa khususnya di desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teori.....	17
2.2.1 Pemberdayaan	17
2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat	21
2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa	34
2.2.4 Masyarakat.....	39
2.2.5 Pengembangan	44
2.2.6 Pengertian Pengembangan masyarakat	46

2.3 Prinsip Pengembangan masyarakat	47
2.3.1 Manajemen Pengembangan Masyarakat	48
2.3.2 Strategi Pengembangan Masyarakat	51
2.3.3 Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat	52
2.3.4 Model Pengembangan Masyarakat	53
2.4 BUMDes	54
2.5 Teori Pembangunan	60
2.6 Ekonomi kreatif	63
2.7 Kerangka berfikir	68
2.8 Definisi Konseptual	69
2.9 Definisi Operasional.....	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Yang Digunakan	72
3.2 Jenis Penelitian.....	72
3.3 Lokasi dan Waktu	72
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	72
3.3.2 waktu penelitian.....	73
3.4 Penentuan Narasumber.....	73
3.5 Jenis dan Sumber Data	73
3.5.1 Jenis Data	74
3.5.2 Sumber Data.....	74
3.6 Metode Pengumpulan Data	74
3.7 Metode Analisis Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum lokasi penelitian	81
4.1.1 Geografis Desa Dulolong	81
4.1.2 Keadaan Pemerintah Desa Dulolong	82
4.1.3 Demografi Desa Dulolong	84
4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	84
4.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	85
4.1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	86

4.1.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Penncaharian Pokok	87
4.1.8	Keadaan Ekonomi	89
4.1.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan	89
4.1.10	Sarana dan Prasarana Desa.....	90
4.2	Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dulolong	
4.2.1	Landasan Hukum	90
4.2.2	Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dulolong	92
4.2.3	Visi Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dulolong....	92
4.2.4	Jenis Usaha BUMDes Dulolong	92
4.2.5	Kepengurusan BUMDes Dulolong	93
4.2.6	Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dulolong	94
4.3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	95
4.3.1	Kesejahteraan	95
4.3.2	Ketercukupan	102
4.3.3	Akses	106
4.3.4	Partisipasi	115
4.3.5	Masyarakat Terhadap Pengambilan Keputusan	118
4.3.6	Keterbukaan Lembaga Dalam Pembuatan Kebijakan	122
4.3.7	Kontrol	126
4.3.8	Pengendalian oleh pemerintah.....	131
4.4	Faktor Yang mempengaruhi Pengembangan BUMDes	133
4.4.1	Strategi Komunikasi	133
4.4.2	Perumusan Misi dan Tujuan.....	135
4.4.3	Sosialisasi	139
4.4.4	Strategi Program Sumber Daya.....	149
4.4.5	Sarana Dan Prasarana.....	152
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	155
5.2	Saran	156
5.3	Penutup	157
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Kerangka Teori	69
Tabel 4.1 Struktur Usia Penduduk Desa Dulolong Tahun 2018	85
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.	86
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dulolong.	87
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahrian	88
Tabel 4.5 Jumlah penduduk Berdasar kan keyakinan yang Dianut	89
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa Dulolong	90
Tabel 4. 7 Jumlah Sarana Kegiatan Bumdes Di Desa Dulolong.....	96
Tabel4.8 Kesejahteraan Keluarga di Desa dulolong 2017-2018.....	97
Tabel 4.9 Mata Pencarian Pokok Tahun 2018	99
Tabel 4.10 Verifikasi Dana Koperasi Desa di Desa Dulolong 2018.....	101
Tabel4.11 Jenis Bantuan Koperasi Desa Tahun 2017-2018	104
Tabel4.12 Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Modal Dana Koperasi Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor Tahun 2018	105
Tabel4.13 Keterlibatan Bank Dalam Pelaksanaan Koperasi Desa Tahun 2018.....	108
Tabel 4.14 Tim Penggerak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2017-2018.....	110
Tabel 4.15 Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dulolong 2017.....	111
Tabel 4.16 Potensi Sumber Daya Alam Desa Dulolong	112
Tabel4.17 Ketersediaan Anggaran dalam Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dulolong 2017-2018	112
Tabel 4.18 Hasil Verifikasi Biaya yang dikeluarkan oleh sasaran Dana Koperasi Desa	114
Tabel 4.19 Daftar Hadir Forum Yasinan di Desa Dulolong Tahun 2018	117
Tabel 4.20 Tim Schedule Kegiatan Rapat Desa Dulolong Pada Tahun 2018 ...	125
Tabel4.21 Jadwal Laporan BUMDes Pada Tahun 2018.....	126
Tabel4.22 Pengendalian Implementasi BUMDes Tahun 2017 dan 2018	130
Tabel 4.23 Bentuk Strategi Komunikasi Program BUMDes Desa Dulolong	132
Tabel 4.23 Strategi sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	134
Tabel 4.24 Strategi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Labuan Mapin	141
Tabel 4.25 Strategi Kelembagaan BUMDes Desa Labuan Mapin	145
Tabel 4.26 Tabel tentang Luas Tanah Produktif/tanah untuk pertanian Desa Dulolong.....	156
Tabel4.27 Fasilitas Yang Dimiliki Oleh BUMDes Desa Dulolong	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan subur. kekayaan alam dan laut yang melimpah dari ujung sabang sampai merauke. dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. seperti halnya kekayaan yang dimiliki Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur berupa lahan pertanian yang luas, hasil panen padi, jagung dan sayur-mayur yang melimpah dan juga memiliki peternakan dan perikanan. menurut (UUD 1945 pasal 33 ayat 3), tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, (2) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Apabila kita melihat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan badan usaha milik desa, untuk selanjutnya disingkat (BUMDES) Di Nusa Tenggara Timur sungguh jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, sehingga keadaan ini mengindikasikan bahwa sangat tidak mungkin provinsi nusa tenggara timur bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya dalam pengembangan BUMDES.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Walaupun selogannya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi dengan maksimal maka didirikanlah BUMDes yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Dengan kenyataan bahwa pengembangan BUMDes di desa dulolong yang belum lama terbentuk dan menjadi salah satu contoh BUMDes yang belum cukup berkembang dalam mengelolah aset-aset kekayaan di desa dulolong yaitu dengan kekayaan alam yang telah tersedia dan dukungan dari internal desa. Namun desa dulolong adalah satu desa yang belum mampu mengembangkan BUMDes itu sendiri. sehingga dapat dikatakan bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) di desa dulolong nusa tenggara timur harus ada campurtangan dari pemerintah desa dan sehingga , pembangunan desa 2014: 36) benar-benar diberdayakan oleh masyarakat setempat Dengan keadaan dan kondisi obyektif di desa dulolong yang menunjukkan bahwa desa-desa dan

masyarakat desa kabupaten alor nusa tenggara timur yang secara umum masih berada pada kondisi tertinggal.

Maka upaya meningkatkan pembangunan daerah pedesaan di Desa Dulolong di era otonomi daerah sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis yang perlu dicermati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, keberhasilan dalam pelaksanaan hal tersebut bagaimanapun akan memberikan sumbangan serta adil yang sangat besar baik dalam rangka upaya pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya BUMDes maupun bagi upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara secara keseluruhan.

Melihat realitas masalah pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membinapotesi yang ada di daerah tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sehingga sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Mengingat Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia, Sehingga titik sentral pembangunan adalah pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagaimana masukan dan keluaran. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUMDes dapat dikategorikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian dan penerimaan kembali hasil. Pemberdayaan

masyarakat dan pembangunan sebagai input atau masukan yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat sehingga bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui berbagai upaya pemberdayaan.

Program BUMDes di Desa Dulolong Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak efektif dikarenakan masih belum terbuka dan terperinci khususnya dalam urusan anggaran dan aparat pemerintah desa masih kurang menganggap BUMDes sebagai bentuk arah penentuan perencanaan perekonomian masyarakat. Masyarakat juga tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi mereka untuk sampai pada usulan rencana pengembangan BUMDes Di Desa Dulolong selama ini tidak pernah presentasi tentang jumlah program atau kegiatan BUMDes yang berasal dari aspirasi masyarakat, program pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dengan tidak adanya penjelasan yang cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya BUMDes yang berada di pemerintahan desa sehingga hal-hal yang menjadi kontrak produktif di dalam pelaksanaan BUMDes selanjutnya. Hal ini bukan serta merta kesalahan dari kesalahan pejabat desa, karena dalam perumusan yang telah di tampilkan dalam BUMDes Di Desa Dulolong Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan survei awal di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur (NTT) pemberdayaan BUMDes masih dikatakan belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat

tentang BUMDes sehingga tingkat partisipatif masyarakat dalam pembangunan ekonomi mandiri belum terakomodir dengan baik oleh pihak Desa lewat program BUMDes yang di wacanakan. Desa Dulolong adalah salah satu desa yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah dan memadai, namun ketersediaan dua aitem tersebut tidak dapat di kelola dan dikembangkan secara optimal karena kurangnya daya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat desa hingga sampai pada saat ini masih tergolong di bawah rata-rata.

Berdasarkan survei awal di desa dulolong kecamatan abal kabupaten alor BUMDes memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi di Desa Dulolong BUMDes masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam keikut sertaan dalam program BUMDes. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “ **Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). (Studi Kasus Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Tahun 2018)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pemberdayaan ekonomian kreatif Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Bumdes Di Desa Dulolong?
2. Faktor apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif Bumdes di Desa Dulolong tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Bumdes Di Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor
2. Bagaimana Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Bumdes Di Desa Dulolong Kabupaten Alor

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis Rencana penelitian ini diharapkan dapat Membantu meningkatkan sistem pendidikan serta menambah wawasan dan kemampuan berpikir pada perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara peraktis rencana penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi peneliti

Rencana penelitian ini selain menamba wawasan bagi peneliti juga Sebagai bahan pembelajaran guna untuk meningkatkan kualitas kinerja khususnya di pemerintahan Desa.

2. Bagi pemerintah

Rencana penelitian ini diharapkan berguna Sebagai bahan informasi baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor khususnya pemerintahh desa dulolong.

3. Bagi masyarakat

Rencana penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas khususnya masyarakat desa dulolong dalam upaya pengembangan badan usaha milik desa.

4. Bagi akademisi

Rencana penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran serta sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya yang membahas masalah-masalah yang terkait dengan bumdes untuk mencari perbandingan selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian yang dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal ini menjadi suatu alasan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkayakan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari peneliti terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Coristya Berlian Ramadana (2012),

Dengan judul penelitian, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, menyimpulkan bahwa: Badan usaha milik Desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial, ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat Desa utamanya mengenai bidang usaha. Pembentukan BUMDes di Desa

Landungsari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa (3) faktor penghambat dan pendukung.

Hasil penelitian ini adalah keberadaan badan usaha milik Desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh Desa dengan peraturan Desa mengenai badan usaha milik Desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan Desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik Desa ini hanya sebatas papan nama saja.

2. Lely Indah Mindarti (2014)

Dengan judul penelitian, “Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk), Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik”, menyimpulkan bahwa: Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di Desa adalah dengan meningkatkan pendapatan Desa. Besar kecilnya pendapatan Desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDes dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di Desa. Karena menurut PP no 72 Tahun 2005 pasal 78 Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa.

Tulisan ini mendiskripsikan bagaimana strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes dalam meningkatkan pendapatan Desa. Adapun strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes Sekapuk meliputi mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi atau kontrol. Strategi tersebut dilakukan oleh BUMDes Desa Sekapuk baik dalam bidang produksi maupun jasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BUMDES dapat meningkatkan pendapatan Desa Sekapuk dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

3. Reza M. Zulkarnaen (2016)

Dengan judul penelitian “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.

Menyatakan bahwa : BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa, yaitu dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa. Desa Parakan Salam dan Desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, samapi saat ini belum mempunyai BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Namun, jika dilohat dari potensinya, kedua Desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDes sebagai penampung kegiatan-krgiatan ekonomi masyarakat dan

lembaga pelayanan publik masyarakat. Oleh karena itu, melalui program PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.

4. Dodi Faedlulloh (2018)

Dengan judul penelitian, “BUMDes dan Kepemilikan Warga : Membangun Skema Organisasi Partisipatoris”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kepemilikan, dimana warga memiliki legitimasi kepemilikan BUMDes antara lain:1). kepentingan publik, 2). kepemilikan publik. Skema kepemilikan bisa diatur presentase antara “saham” yang dimiliki pemerintah Desa dan warga Desa. Untuk menjaga kepentingan publik, misalnya pemerintah Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDES) bisa menanamkan modal awal 60 %, sedangkan warga sebagai manifestasi kepemilikan publik memiliki “saham” 40 %. Skema ini memungkinkan potensi BUMDES menjadi ruang belajar bagi warga Desa berdemokrasi (ekonomi).

5. Dra. Harmiyati, M. Si (2017)

Dengan judul penelitian, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dimana indikator peranan BUMDes dilihat dari : 1). Penyediaan

peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa, 2). Pemanfaatan aset Desa, 3). pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat.

terdapat dua hal penting yang menjadi konsen dalam menguatkan peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat Desa, yaitu : 1). Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa, 2). Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian Desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Diantaranya Yaitu :

1. BUMDes memiliki salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementrian desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (teradisi berdesa).
2. BUMDes memiliki salah satu strategis kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategis kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia di desa.
4. BUMDES merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan mengerakan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Tabel : 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Kesimpulan	Persamaan Dan Perbedaan	Kritikal Point
1	Coristya Berlian Ramadana (2012)	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	Hasil penelitian ini adalah keberadaan badan usaha milik Desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh Desa dengan peraturan Desa mengenai badan usaha milik Desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan Desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik Desa ini hanya sebatas papan nama saja.	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif deskriptif. - Perbedaan Penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus penelitian dimana indikator Peranan BUMDes dilihat dari <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa, 2) Pemanfaatan aset Desa, 3) Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat dari pada indikator Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Milik 	BUMDes sangat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan BUMDes itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat bersama.

				Desa	
2	Lely Indah Mindarti (2014)	Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk), Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik	Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di Desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan penelitin terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif . - Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus penelitian dimana indikator pnelitian terdahulu ini berfokus pada kekuasaan dan kepentingan pemerintah, karakteristik lembaga pemerintahan desa dan respon pelaksanaan kebijakan. Sedangkan untuk peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan badan usaha milik desa 	Untuk meningkatkan menajemen terkait aset bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemgembangan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa.
3	Reza M. Zulkarnaen (2016)	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan	Dari penilaian hasil analisis ditemukan bahwa Desa Parakan	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan Penelitian terdahulu dengan peneliti ini 	Potensi yang dimiliki oleh desa dalam meningktkan

		Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.	Salam memiliki potensi dalam mendirikan BUMDes. Berdsarkan potensi yang ada maka hal ini dijadikan dasar diadakannya penyuluhan mengenai BUMDes di kedua Desa tersebut, terutama tentang pentingnya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu ini melihat potensi yang dimiliki kedua desa yang dapat dilihat dari lokasi desa strategis dan lokasi desa yang dekat dengan pasar sedangkan bagi peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha milik desa.	pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi melalui bumdes sangat penting karena BUMDes memegang peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik.
4	Dodi Faedlulloh (2018)	BUMDes dan Kepemilikan Warga : Membangun Skema Organisasi Partisipatoris.	Skema kepemilikan bisa diatur persentase antara "saham" yang dimiliki pemerintah desa dan warga desa. Untuk menjaga kepentingan publik, misalnya	- Persamaan Penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Untuk mencapai kesejahteraan bersama tentunya bagi pemerintah desa dan warga masyarakat harus bekerja sama dalam

			<p>pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APDES) bisa menanamkan modal awal 60%, sedangkan warga sebagai manifestasi kepemilikan publik memiliki “saham” 40%. Skema ini memungkinkan potensi BUMDes menjadi ruang belajar bagi warga desa berdemokrasi (ekonomi).</p>	<p>deskriptif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan Penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus penelitian dengan indikator kepemilikan dan warga memiliki legitimasi kepemilikan bumdes antara lain kepentingan publik dan kepemilikan publik sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan BUMDes 	<p>pembangunan desa melalui BUMDes</p>
5	<p>Dra. Harmiyati, M. Si (2017)</p>	<p>Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN</p>	<p>Terdapat dua hal penting dalam menguatkan peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa, yaitu: 1) Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa, 2) Agar BUMDes inidapat berkembang dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan Penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. - Perbedaan Penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus penelitian dimana indikator 	<p>Keberadaan BUMDes sangat berperan penting dalam pengembangan masyarakat secara ekonomi yang berdaya saing tinggi dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.</p>

			<p>menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>peranan BUMDes dilihat dari 1) Penyediaan peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa, 2) Pemanfaatan aset desa, 3)Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan badan usaha milik desa.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pemberdayaan

Menurut Priyono dan Pranarka (2001 : 89) pemberdayaan mengandung dua arti. Yang pertama adalah *to give power or author*, pengertian kedua *to give ability to or anable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi member kekuasaan, dan mengalihkan kekuatan kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Disisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah member kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Ambar Teguh (2004: 78/79) menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan dimaksud adalah member “daya” bukan “kekuasaan” dari pada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “*energize*” atau katakan member “energy” pemberdayaan adalah pemberian energy agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut Edi Suharto (2005 :57). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau pemberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan juga tidak terlepas dari pembangunan yang dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Sehingga pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Sedangkan menurut Suhendra (2006:74-75) pemberdayaan adalah suatu keinginan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong semua keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsure partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan

mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek (Suparjan, 2003: 44). Selanjutnya menurut Suparjan (2003: 43) pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan menentukan masa depan mereka.

Menurut Edi Suharto, (2009:6) dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan :

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumber daya dan keterampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai pemberdayaan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.
- b. Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian mereka. Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya dimiliki, seperti keuangan , teknis, dan alam serta manusia dari pada mengantungkan diri terhadap bantuan

dari luar. Melalui program pemberdayaan masyarakat diupayakan agar masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada dalam masyarakat seminimal mungkin.

- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d. Penyongkongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas, Edi Suharto 2009: 7-8. Pemberdayaan di atas dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep utama yang terandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat banyak pakar yang membahas hal ini, salah satunya adalah Isbandi Rukminto (2008:77) mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Sehingga Rukminto (2008: 89) Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat terdapat 4 prinsip yang sering kali digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, berkelanjutan dan keswadayaan atau kemandirian.

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun wanita. Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan,

pengalaman, serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun agar sampai pada tingkatan tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang/disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, walaupun di awalnya peran pendamping lebih dominan dari pada masyarakat sendiri. Tetapi perlahan-lahan tanpa pasti, peran pendamping akan berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

4. Prinsip Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan yakni menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Akan tetapi konsep ini tidak melihat kepada orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan “the have not”, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit “the have little”.

Isbandi Rukminto (2008: 89). Mengatakan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan

Dengan adanya perbaikan dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan Usaha

Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang sedang dilakukan.

c. Perbaikan Pendapatan

Dengan adanya perbaikan bisnis, diharapkan dapat memperbaiki penghasilan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan, karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas menjadi penyebab kerusakan pada lingkungan.

e. Perbaikan Kehidupan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan pola hidup setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan Masyarakat

Kehidupan yang membaik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Menurut Eddy Ch.Papilaya (2001 : 1) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan serta upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Subejo (2013:59) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya local yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Menurut Kartasmita (2002:156-160) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*)

Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Menurut Sumodiningrat (2004 :320) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapaun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka, Sumadiningrat. Mengemukakan upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang menungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran

akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.
3. Memperdayakan mengandung pola arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah bertambah lemah, oleh karena kekurangan pemberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan pada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melulaukan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persiangan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama. Sumodiningrat, mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Upaya itu harus terarah, upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- b. Program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola,

dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya.

- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penangananya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Menurut suyono usman (2015 :44) pemberdayaan masyarakat lazim di konsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi dengan perencanaan (plan) kearah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan asset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis setting wilayah geografis, sektor, modernisasi, kelas dan status. Dalam kaitan dengan pemberdayaan, kapabilitas (capability) adalah energi yang di gunakan untuk mendayagunakan sumber daya (resouce) yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan aset tersebut.

Selain itu, Blanchard dalam Lorosa, 2017 : 67, mendefenisikan pemberdayaan sebagai upaya menguraikan belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Menurut Jubaedi (2013:4) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat inilah yang mengakibatkan produktivitas masyarakat rendah maka tentu akan sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan ketika kondisi seperti ini terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya itu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, berbahasa dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Menjangkau sumber-sumber yang produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan (Menurut Edi Suharto Dalam Adelia Larosa : 2017).

Edi suharto Dalam Adelia Larosa, mengatakan bahwa Usaha memberdayaka desa serta menaggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembanguna pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak cukup imlementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar.

Lebih dari ini adalah sebuah upaya spectrum kegiatan menyentuh pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat mandiri, percaya diri dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara (Dalam Skripsi Ayu, 2014).

Menurut kartasmita, 2017: 1-16. pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi yang sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan proses, pengertian pemberdayaan proses menunjukan pada serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

Menurut aziz dalam zubaedi (2013: 5) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya
2. Melakukan analisi (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok- kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus)
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilah setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan ini untuk dimulai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.
7. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu upaya yang harus dilaksanakan.

Suyoto usman (2015) mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan melalui dua cara yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pula melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana tau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya karena kalau demikian akan mudah mengalami kepunahan (Edi Suharto, 2014).

UNICEF dalam Suyoto Usman (2002: 8), mengajukan 4 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang tentunya keempat dimensi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan dan saling melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi yang sudah disebutkan oleh UNICEF dalam:

1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingka kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka yang ada di kelas bawah.

3. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingakat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada didalamnya. Artinya masyarakat ikut adil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan masyarakat tidak akan terabaikan, karena dalam pengambilan keputusan sudah diberikan kesempatannya terhadap masyarakat untuk ikut adil dalam memberikan saran serta kritikan terhadap masalah yang dihadapi.

4. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya dengan sumber daya yang ada semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Zubaedi (2013: 76) bahwa pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Menunjang definisi dari Asian Development Bank (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di anggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik: (1) Berbasis Lokal; (2) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) Berbasis kemitraan; (4) Secara holistic; (5) Berkelanjutan.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) pemberdayaan masyarakat desa juga dapat di artikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan pengontrolan lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat desa agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012:27) mengartikan masyarakat desa yaitu:

Upaya untuk memberikan kesempatan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasannya, serta kemampuan dan keeranian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat desa, Winarmi dalam Ambar Teguh (2004 : 79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling) memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan masyarakat desa tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Chatarina Rusmiyati (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan masyarakat desa dianggap sebagai sebuah proses menjadikan orang yang lebih kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian – kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan Chatarina Rusmiyati, 20011: 17. Konsep pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah desa dalam pemanfaatan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dala program pemberdayaan msyarakat desa ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Berikut ini merupakan program-program pemerintahan desa Menurut Amin Jaya, 20014: 29. dalam pemberdayaan masyarakat desa:

1. Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan desa.

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada dipemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan DPD. Bentuk dari pemberdayaan ini daat berupa pelatihan musyawarah dan penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa dan peningkatan kualitas kinerja dipemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemeritahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat dibidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakat yang ada di desa. Ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana prasarana. Dengan

adanya program pemberdayaan dibidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan dan permodalan, banutan alat produksi, peningkatan sarana prasarana. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi

Program pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi di harapkan dapat meningkatkan daya saing masyarkat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

6. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Program pemerintahan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini tidak hanya di tujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasaran, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu dan beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berkompeten.

2.2.4 Masyarakat

Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi). sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Paul B. Harton, (2017) menurutnya pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut.

Menurut Ralph Linton, (2018) pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut John J. Macionis, (2018) definisi masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. Menurut Soerjono Soekanto, (2007 : 209-279) pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria seperti dibawah ini:

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.

2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

Menurut Selo Sumardjan, (2017) pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Suatu masyarakat dapat dikenal dari karakteristik yang ada didalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Berada Di Wilayah Tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat diatas, suatu kelompok masyarakat mendiami disuatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antara individu .

2. Hidup Secara Berkelompok

Manusia adalah makhluk social dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

3. Terdapat Suatu Kebudayaan

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami pengesuaian dan diwariskan secara turun temurun.

4. Terjadi perubahan

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi dimasyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

5. Terdapat Interaksi Sosial

Interaksi sosial akan selalu terjadi didalam suatu masyarakat. Interaksi ini biasa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.

6. Terdapat Pemimpin

Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindak lanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagai mana semestinya.

7. Terdapat Stratifikasi Sosial

Didalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini

stratifikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat : sesuai dengan Visi pemberdayaan masyarakat “Terwujudnya kemandirian masyarakat yang berbasis kepada pembangunan manusia seutuhnya menuju kesejahteraan masyarakat”, maka tujuan pemberdayaan masyarakat adalah :

- 1) Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada.
- 2) Terwujudnya pengembangan usaha ekonomi kerakyatan disektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa, peningkatan lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.
- 3) Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) secara optimal dan sumber daya desa melalui kerja sama antara lembaga.
- 4) Terwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan termasuk peran perempuan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat.
- 5) Terwujudnya aparatur pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dalam pemberdayaan melalui manajemen perencanaan partisipatif serta pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin dan professional.

Sasaran pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan masyarakat
- b. Penilaian dan evaluasi desa-desa berprestasi
- c. Peningkatan data dasar desa
- d. Terlembaganya sektor informal seperti BUMDES, Pasar Desa, UPK dan SPP
- e. Meningkatnya peran perempuan pedesaan dalam usaha ekonomi produktif
- f. Peningkatan kualitas kelompok masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)
- g. Peningkatan kualitas SDM pengurus pos pelayanan teknologi (POSYANTEK) dan sumber daya desa (SDD)
- h. Peningkatan kerja sama antara lembaga terkait
- i. Mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat pedesaan
- j. Peningkatan pelestarian sumber daya desa (SDD)
- k. Peningkatan kemampuan kapasitas LPMD, UPK Gerdutaskin/ PPKM dan Sanimas
- l. Peningkatan kerja sama antara lembaga formal dan informal
- m. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan sistem manajemen pembangunan partisipatif (SMPP)
- n. Meningkatnya profesionalisme aparatur
- o. Meningkatnya budaya kerja

- p. Meningkatnya tertib administrasi
- q. Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional
- r. Terpeliharanya asset.

Dengan demikian Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara koadratif saling membutuhkan satu sama lain.

2.2.5 Pengembangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2002 :538) yang artinya proses cara, perbuatan mengembangkan. Dengan demikian pengembangan adalah proses dalam mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju. Bila proses pengembangan ini diterapkan dalam dunia pemerintahan maka ide, gagasan ataupun rancangan yang sudah dianggap matang dan berhasil kemudian di tingkatkan dengan kualitas pemerintahan yang sudah ada akan lebih meningkat ketika proses pengembangan ini terus ditingkatkan.

Menurut Punaji Setyosari (2013:222-223), pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus, langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut melakukan uji coba lapangan

sesuai dengan latar dimana produk tersebut akan dipakai dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.

Pengembangan sebagai suatu proses menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bilah dalam suatu masyarakat bila tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. (Sulistiyani, 2004 : 77).

Sulistiyani, mengatakan bahwa Tujuan pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujud apabila pengembangan tersebut bukan hanya pembangunan yang bersifat ekonomi semata, tetapi pembangunan bersifat sosial dan budaya. Pengembangan BUMDes baru bergaung ketika Desa memasuki babak baru. Lahirnya UUDesa mengatur tentang kewenangan, hak, dan kewajiban desa, termasuk di dalamnya mengatur tentang pendirian BUMDes sebagai bagian penting dari roda kehidupan desa. Adanya Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) No. 4/2015 semakin menguatkan inisiasi pendirian BUMDes sebagai salah prioritas pembangunan desa.

Menurut Munawar (2018: 12) Pengembangan dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, serta mampu memperbesar pengaruh terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Selain itu pengembangan juga merupakan

suatu swadaya masyarakat yang diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat. Sehingga pembangunan ini berguna untuk meningkatkan kondisi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sebagai sebuah metode atau pendekatan yang relatif baru, pengembangan menekankan adanya proses pemberdayaan, partisipasi dan peranan langsung dengan warga dalam proses pembangunan ditingkat komunitas dan antar komunitas.

Secara khusus Munawar mengatakan bahwa pengembangan juga berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan keseimbangan masyarakat sehingga masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2.2.6 Pengertian Pengembangan masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut pilihan mereka. Menurut Gordon G.Darkenwald dan Syaran B.Meriam,

pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-maalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.

Sedangkan menurut Twelvetrees pengembangan masyarakat adalah “the proces of assisting ordiary people to improve their own communities by undertalking collective actions”. Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama. Maka dari itu, pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2.3.Prinsip Pengembangan masyarakat

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.
- b. Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat

membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.

2.3.1 Manajemen Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan *community-based management* (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat

pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan program diantaranya yaitu : **Pertama**, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dari kelompok sasaran. Masyarakat pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi. Namun, hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial dalam tahapan ini adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga dari kelompok sasaran. **Kedua**, tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. **Ketiga**, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah

pembentukan masyarakat dimana seluruh warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal dikalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan. Sementara sasaran lebih bersifat khusus dibandingkan tujuan. Pekerja sosial menetapkan apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang akan dicapai kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan dapat diungkapkan secara jelas kepada warga. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Untuk memahami tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek dipahami dari sesuatu yang luas ke spesifik, dari yang abstrak ke kongkrit. **Keempat**, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan *stakeholder*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan. **Keenam**, tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus, baik secara formal maupun semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dan bahkan harian. faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan *stakeholder*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pememin-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

2.3.2 Strategi Pengembangan Masyarakat

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu:

1. *The growth strategy* Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.
2. *The welfare strategy* Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah.

3. *The Responsitive Strategy* Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.
4. *The Intergrated or Holistic Strategy* Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

2.3.3 Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas (*capacity buliding*) sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi keertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, ketakberdayaan dan kemiskinan. Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat menurut Suharto yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

- b. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- c. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan

2.3.4 Model Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu :

- a. Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

- b. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebutaan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi).

- c. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses

pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin sebab dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Model pengembangan masyarakat juga diterapkan dalam ruang organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam kegiatan pengembangan masyarakat LSM menggunakan tiga jenis pendekatan.

2.4. BUMDes

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2008 dalam PKDSP (2007) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. BUMDes merupakan lembaga keuangan kelurahan atau desa yang didirikan melalui ketetapan Peraturan Desa (PERDes) dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan sosial dengan ciri-ciri sebagai lembaga

keuangan kelurahan /desa yang dikelola dengan prinsip kebersamaan dan dikelola menggunakan BUMDes.

BUMDes menjadi bagian lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga desa, dan tentunya harapan tertentu dapat diiringi dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Salah satu kabupaten yang memiliki nilai IPM rendah adalah Gunung Kidul. Rendahnya IPM Gunung Kidul merupakan salah satu dasar pemilihan dilaksanakannya penelitian ini. berbagai potensi desa ada di Gunung Kidul adalah Desa Bleberan.

BUMDes adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya BUMDes dilandasi oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDesa dalam Undang-Undang desa No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Abdul Halim (2011: 189), BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain: memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. minimnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes adalah kendala utamanya bahkan ditingkat kepala desa, sebagai entitas baru BUMDes masih belum sepenuhnya tersosialisasi pada seluruh warga desa di berbagai belahan Indonesia. Akses informasi yang terbatas karena kondisi geografis sebagian besar desa menjadi kendala yang membuat warga masyarakat kesulitan mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai BUMDes.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur lebih terperinci. UU Desa ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X kedalam tiga pasal :

1. Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

3. Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

- 1) Pengembangan usaha , dan Pembangunan Desa
- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan ABD

Berdasarkan pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari :

1. Perencanaan pembangunan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa

Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrembang Desa yang mengikut sertakan masyarakat.

Menurut Zulkarnain (2014) beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat serta menndarkan pada prinsip-prinsip :

1. Kooperatif
2. Partisipatif
3. Trasparansi

4. Emansipatif

5. Akuntabel Dan Sustainable

Menurut Fachri (2001) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program yang diprakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin tau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi sumber dana yang tersedia. Tujuan program BUMDes adalah mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal dimana modal awal dari usaha ini berasal dari APBD I dan II.

Selain itu juga guna mendorong terjadinya proses perubahan sosial ekonomi penduduk kurang mampu dan badan usaha yang lemah agar menjadi lebih proaktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif.

Adapaun maksud dan tujuan BUMDes dalam pembangunan desa yaitu:

1. Mendirikan badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa
2. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Mampu menggerakkan perekonomian desa
4. Memberikan peran terhadap desa

5. Meningkatkan pendapatan asli desa
6. Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
7. Membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan pekerjaan

Menurut Zulkarnaian (2014) mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, BUMDes dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Selanjutnya, jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Adapun tugas dan peran pemerintah desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes (Subbg Hukum Bpk, 2015)

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah

desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya. (Zulkarnain, 2014)

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.

2.5. Teori Pembangunan

Menurut Peet dan Hartwick, 2009: 89). Pembangunan adalah upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang. Hal ini berarti pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik, ataupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang tidak dapat ditinggalkan. Kondisi ini mempunyai banyak ukuran dan kriteria yang berbeda. Akibatnya, ukuran kondisi yang lebih baik bagi seseorang belum tentu baik menurut orang lain, bahkan dapat saja menjadi kondisi yang lebih buruk. Contohnya pemerintah beranggapan kondisi yang lebih baik bagi bangsanya adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Peet dan Hartwick, mengatakan teori pembangunan di produksi oleh para teoritis yang mempunyai beragam sudut pandang dan merepresentasikan

banyak kepentingan. Teori pembangunan yang dominan mempresentasikan kepentingan yang dominan dalam sebuah kelompok masyarakat. Sejak masa pencerahan dan dilanjutkan dengan revolusi industri teori pembangunan dimasyarakat sangat didominasi kepentingan kelas dominan yaitu kelas kapitalis. Kepentingan kelas dominan ini selalu mendapatkan kritikan dari kaum yang mengkritik sistem kapitalisme. Kritik- kritik ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan teori pembangunan.

Peet dan Hartwick, (2009). Membagi dua bagian besar teori pembangunan yaitu, pertama teori pembangunan yang dikelompokkan sebagai teori pembangunan konvensional, teori ini diposisikan sebagai sebuah teori yang menerima keberadaan struktur kapitalisme sebagai jenis terbaiknya masyarakat. Teori ini menekankan pada pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Sedangkan problem yang muncul sebagai akibat untuk mencapai tujuan tersebut, seperti ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan hidup, dipandang hanya dampak dari upaya untuk mencapai tujuan. Teori- teori yang berada pada garis teori pembangunan konvensional adalah teori ekonomi klasik, teori ekonomi neo klasik, teori modernisasi dan teori Neo – liberalisme. Teori konvensional hadir sebagai hasil zaman pencerahan yang telah melahirkan cara berpikir rasional dan empiris yang berkontribusi besar bagi munculnya peradaban moderen. Cara berikir baru ini berpengaruh besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berdampak pada terjadinya perubahan tatanan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang sebelumnya di dominasi oleh kelas-kelas pemilik modal.

Kedua, *teori unconventional*. Teori ini merupakan antitesis dari teori pembangunan konvensional yang telah mendominasi peradaban moderen saat ini. berkebalikan dengan teori konvensional, teori- teori yang berada pada garis pemikiran *unconventional* tidak menerima sistem kapitalisme sebagai sistem masyarakat terbaik, bahkan ada juga yang menolak ide-ide pencerahan yang telah membentuk peradaban moderen. Meskipun sama-sama tidak memilih kapitalisme sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ideal, teori-teori yang berada pada garis pikir *unconventional* tidak seragam. Teori-teori ini memiliki perbedaan mendasar dalam memandang sistem ideal masyarakat.

Menurut Stiglitz (2014:20) menyatakan bahwa teori pembangunan lebih ambis dari pada dokumen perencanaan, karena teori pembangunan menyiapkan strategi bukan hanya untuk akumulasi modal dan penempatan sumber daya, tapi juga strategi untuk transformasi masyarakat. Pembangunan memiliki peran penting sebagai pemercepat terjadinya transformasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi area keuntungan komparatif negara. Mengidentifikasi area ini dan mempublikasikannya sebagai barang publik adalah tanggung jawab pemerintah.

Stiglitz, mengatakan bahwa pembangunan perlu memajukan wacana (vision) tentang transformasi. Strategi pembangunan kadang dilihat sebagai blueprint, sebuah peta yang menggambarkan kemana masyarakat akan menuju. Seperti yang kita ketahui bahwa semua masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya, apalagi bagi masyarakat pada negara miskin. Diatas keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat adalah keterbatasan

kemampuan (capacity) pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan perlu menetapkan prioritas. Kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan dalam rangka keberhasilan pembangunan tidak hanya dipelukan koordinasi antara agen-agen di dalam dan di antara level-level pemerintahan, tapi juga harus ada koordinasi antara sektor swasta dengan sektor publik.

Menurut Stiglitz (2014) proses konstruksi pembangunan memainkan peranana yang penting, untuk membantu membentuk konsensus-konsensus tidak hanya tentang wacana luas tetang masa depan Negara dan tujuan jangka pendek dan menengah, tapi juga merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. pembangunan tidak hanya sebagai bagian untuk mencapai stabilitas sosial dan politik, tapi juga menggiring kepada kebijakan dan institusi yang dapat meningkatkan kesuksesan. Pembangunan di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang menganut prinsip kemestaan, artinya pembangunan bersiat komperensif mencangkup seluruh segi kehidupan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang.

2.6 Ekonomi kreatif

Menurut presiden Susilo Bambang Yudhoyodo dalam Agung Pascasuseno (2014) ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasisi kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada kreatifitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Terdapat pergesaran orientasi

gelombang ekonomi dalam sejarah manusia. Dimulai dari perubahan era pertanian ke era industrialisasi, setelah itu terbentuk era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan bidang teknologi informasi. Peradaban yang baru dan semakin berkembang bagi manusia.

Agung Pascasuseno, mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreatifitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreatifitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi di tentukan oleh bahan baku atau sistem sistem produksi pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreatifitas, dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreatifitas dan imajinasi.

Mengutip dari cetak biru ekonomi kreatif Agung Pascasuseno, menyebutkan ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreatifitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Agung Pascasuseno menyebutkan terdapat tiga hal pokok yang menjadi dasar ekonomi kreatif, antara lain;

a. Kreatifitas (Creativity)

Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat di terima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (thinking out of the box) seseorang yang memiliki kreatifitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain.

b. Inovasi (Innovation)

Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreatifitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat.

c. Penemuan (Invention)

Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat di akui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah di ketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis android dan ios juga menjadi salah satu contoh yang berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Agung Pascasuseno (2014) mengatakan bahwa ekonomi kreatif mulai ramai di perbincangkan sejak John Howkins, menulis buku "*Creative Economy, How People Make Money From Ideas*". Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah

gagasan. Maka dapat di bayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi. Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor sebagai pilar maupun penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Keberlanjutan yang dimaksud adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis dan tantangan ekonomi baru, yang pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan pertumbuhan (*sustainable growth*). Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Yang mana, Indonesia bisa mengembangkan model ide dan talenta dari rakyat untuk dapat menginovasi dan menciptakan suatu hal. Pola pikir kreatif yang sangat diperlukan untuk tetap tumbuh berkembang serta bertahan di masa yang akan datang.

Menurut Suparmoko (2002:02) pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh pembangunan yang berlandaskan pada upaya peningkatan pertumbuhan harga. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan suatu output perkapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase pertumbuhan output haruslah lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

Menurut Sukirno (2004:14) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu: kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Indikator perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya di buat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam definisi yang lebih eksplisit, yaitu: bahwa pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses interen perekonomian tersebut. Dalam penggunaan secara umum, istilah pertumbuhan ekonomi di gunakan untuk menyarakan kondisi perkembangan ekonomi di negara berkembang. Akhirnya, suatu perekonomian baru dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat. Pada aspek ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Pada dasarnya Sukirno, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok:

- 1) Pertumbuhan
- 2) Penanggulangan kemiskinan
- 3) Perubahan atau transformasi ekonomi
- 4) Keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Sedangkan menurut Smith (Abdul hakim, 2000 : 64) proses perkembangan ekonomi faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi yang proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau

wirausaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para wirausahaan dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi Smith, membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Smith pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi.

Hal ini terkait dengan tersedianya sumber daya manusia yang handal dan juga tersedianya jaringan pemasaran yang lebih baik dibandingkan kota-kota kecil di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Bagi kota-kota kecil, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan sosial seperti festival untuk mengenalkan produk khas daerah. Perkenalan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat yang menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. (Susan, 2004: 12)

2.7. Kerangka berfikir

Setiap penelitian pasti diperlukannya adanya kerangka berfikir sebagai pijakan atau pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel : 2.2
Kerangka Teori

Aspek pemberdayaan masyarakat	Faktor yang mempengaruhi pengembangan BUMDes
<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas hidup b. Ketercukupan • Akses <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan sumber daya b. Manfaat dan hasil sumber dana • Partisipasi • Kontrol <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian oleh pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • strategi komunikasi <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan misi dan tujuan b. sosialisasi • strategi sumber daya <ul style="list-style-type: none"> a. sarana dan prasarana

Sumber: Suyoto Usman (2002 : 8) dan Abdul Halim (2011: 189)

2.8 Definisi Konsepsional

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain:

A. Strategi

Kotten mengajukan model strategi yang didalamnya terdapat 4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu strategi, yaitu strategi komunikasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Variabel-variabel tersebut tidak saja berdiri sendiri tapi saling terkait satu sama lain serta saling mempengaruhi variabel satu dengan yang lainnya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF mengemukakan pendapat bahwa terdapat 4 aspek sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas; (1) kesejateraan; (2) akses; (3) partisipasi; dan (4) kontrol. Keempat dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis serta saling berhubungan serta sinergis, saling menguatkan dan melengkapi.

2.9 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti, yaitu:

A. Aspek-Aspek Pemberdayaan

1. Kesejahteraan
 - a. Peningkatan Kualitas Hidup
 - b. Ketercukupan
2. Akses
 - a. Ketersediaan sumber daya
 - b. Manfaat dan hasil sumber dana
3. Partisipasi
 - a. Keputusan Masyarakat
 - b. Keterbukaan Lembaga
4. Kontrol
 - a. Pengendalian oleh pemerintahan
 - b. Pengendalian oleh masyarakat

B. Faktor Yang mempengaruhi Pengembangan BUMDes

1. Strategi komunikasi
 - a. Perumusan misi dan tujuan
 - b. Sosialisasi
2. Strategi Sumber Daya
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Kualitas kinerja organisasi

Definisi Konseptual yang digunakan peneliti dan berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu ; UUD 6 Tahun 2014 dalam Pasal 89 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan BUMDes.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular kedalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Digunakan pendekatan ini supaya dapat mengungkapkan permasalahan secara tajam dan mendalam serta dapat memperoleh data yang lebih akurat melalui pertanyaan penelitian. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena dapat mengungkapkan permasalahan lebih mendalam sehingga dapat data yang akurat dan informan sebanyak-banyaknya melalui pertanyaan peneliti, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Pemilihan jenis deskriptif dari cara peneliti memperoleh data yaitu observasi lapangan (field research). Wawancara,observasi dan dokumentasi. Peneliti ingin menjelaskan secara deskriptif mengenai proses strategi diferensiasi.

3.3 Lokasi dan Waktu

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten AlorNusa Tenggara Timur. Alasan mengapa saya

mengambil penelitian dilokasi tersebut adalah karena di Desa Dulolong masih terkendala dalam upaya pengelolaan BUMDes.

3.3.2 waktu penelitian

Penelitian Ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan dan diharapkan selesai tepat waktu.

No	Kegiatan	waktu
1	Observasi awal	10- 11 maret
2	Survey lapangan	15- 16 maret
3	Wawancara	16- 20 maret
4	Pengumpulan data	22 maret – 7 april
5	Pengolahan data	9- 11 april

3.4 Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian kualitatif narasumber (informan) dalam penelitian yang akan di wawancarai adalah:

- 1) Kepala desa dulolong
- 2) Ketua badan usaha milik desa (BUMDes)
- 3) Kasubag desa
- 4) Masyarakat dan Tokoh masyarakat

3.5Jenis dan Sumber Data

Data merupakan faktor penting untuk menunjang suatu penelitian. Sumber data penelitian ini adalah narasumber yang dimintai tanggapan melalui wawancara yang diberikan kepada responden tentang permasalahan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa dulolong

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambaran-gambaran yang tidak dapat diukur dengan angka seperti tanggapan narasumber yang di berikan.

3.5.2 Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulka secara langsung oleh peneliti (Nasir,2014:108). Dalam hal ini melalui proses wawancara daei para nara sumber yakni langsung dari kepala desa Dulolong, Kasubag Desa, ketua BUMDES, masyarakat dan tokoh masyarakat. Dan jawaban atas wawancara dan hal lainnya yang berhubunga dengan masalah yang diteliti.
2. Dataskunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dari luar objek penelitian. Seperti data yang di peroleh dari bahan bacaan, literatur maupun kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti (Nasir,2014: 108)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data lapangan (field research), yang mana berdasarkan jenis data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data primer yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dilakukan dengan pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2010: 145). Dengan metode observasi diharapkan dapat diperoleh dengan jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam penelitian ini akan dipergunakan metode observasi dimana penelitian sebagai partisipasi artinya adalah peneliti ikut terlibat dalam melakukan pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat tapi juga mengadakan observasi yang reliabilitasnya dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Dalam observasi ini, dapat kita mengamati bagaimana proses dan program kerja BUMDes

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu jenis pengumpulan data dengan melakukan sebuah timbal balik atau dengan kata lain merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yang terwawancara (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Sugiyono, 2010: 309).

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013:138) mengemukakan beberapa macam wawancara/interview yaitu:

a. Wawancara Terstruktur (*structured interview*).

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif dan jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data.

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*).

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*).

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dari uraian tersebut pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semistruktur, yaitu wawancara secara mendalam kepada responden namun secara bebas dan terbuka.

Data yang diperoleh peneliti dalam teknik wawancara ini adalah “Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUMDes di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor

3. Dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam sebuah penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menganalisa, menafsirkan bahkan bisa juga meramalkan setiap bahan tertulis (Sugiyono, 2010: 308). Supaya hasil dokumentasi dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan dokumentasi kepada informen atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut..

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, untuk mendukung berjalannya penelitian ini maka penulis menggunakan metode purposive sampling. Dengan pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan yaitu pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, dan jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau, maka penarikan sampel pun sudah harus diakhir. Jadi, kuncinya di sini ialah jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.

- b. Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang digunakan peneliti. Sumber data ini meliputi gambar atau foto-foto, teori-teori seperti buku, jurnal, makalah dll, sebagai tambahan data dan pendukung analisis penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:334).

Dalam analisis data kualitatif, pada dasarnya data dapat dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat (Milles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014). Analisis data dalam kualitatif melewati 3 langkah yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode tertentu pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi data, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan yang penting, dan membuat kategorisasi. Reduksi data berlangsung terus menerus secara penelitian, sesudah penelitian dilapangan sampai laporan akhir tersusun. Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dimaksud adalah instrumen penelitian yang dibagikan pada subjek penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap kedua dari analisis data adalah mendisplaykan data, penyajian data adalah sekumpulan informasi menjadi konsep rasional sesuai dengan kenyataan sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Data-data yang telah diambil dan telah direduksi akan disajikan secara deskripsi dimana hasil wawancara diubah bahasanya menjadi kalimat yang lebih baku dan mudah dimengerti serta dikaitkan dengan teori-teori sesuai dengan hasil wawancara dan observasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk membuat kesimpulan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk pembahasan. Dalam alur ini merupakan kegiatan untuk mengambil kesimpulan terhadap hasil

penelitian yang telah dilakukan atau proses penarikan kesimpulan akhir dari data yang telah diambil.

